

REVIEW RENSTRA RENCANA STRATEGIS 2021-2026

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

KATA PENGANTAR

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan secara ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang sering kali saling berkaitan satu sama lainnya. Persoalan yang paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Disamping itu masih banyak isu-isu yang lain yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup manusia diantaranya kurang berdayanya kaum perempuan, pemilihan alat kontrasepsi yang kurang rasional, rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, tingginya perkawinan diusia muda dan lemahnya ketahanan keluarga.

Dalam upaya mengurangi persoalan-persoalan diatas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto menyusun Review Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 yang akan memberikan arah perencanaan pembangunan 5 tahun kedepan dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dengan tetap berpedoman pada Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Kabupaten Mojokerto.

Akhirnya semoga Review RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Mojokerto, 30 Desember 2023

KEPALA DP2KBP2
KABUPATEN MOJOKERTO



SUGENG NURYADI, S.IP, MM

Pembina

NIP. 196810101989031008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	31

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	35
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	44
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	46
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	52

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	53
--	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dalam 5 Tahun (Renstra)	64
---	----

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Rencana Pendanaan.....67

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD..... 93

BAB VIII PENUTUP 95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Pada Dinas P2KBP2.....	20
Tabel 2.2	Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana pada Dinas P2KBP2.....	22
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Dinas P2KBP2 (Tabel T-C 23).....	26
Tabel TC 24	Anggaran dan Realiasi Pendanaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2011 – 2015	30
Tabel TC 35	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	41
Tabel 3.1	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.....	45
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Permasalahannya.....	46
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Permasalahannya.....	49
Tabel TC 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	54
Tabel 4.2	Cascading Dinas P2KBP2.....	56
Tabel TC 26	Strategi Perangkat Daerah Dalam 5 Tahun (Renstra).....	65
Tabel TC 27	Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021	68
Tabel TC 28	Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan adanya perubahan Sasaran Kinerja dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dilakukan perubahan juga terhadap rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

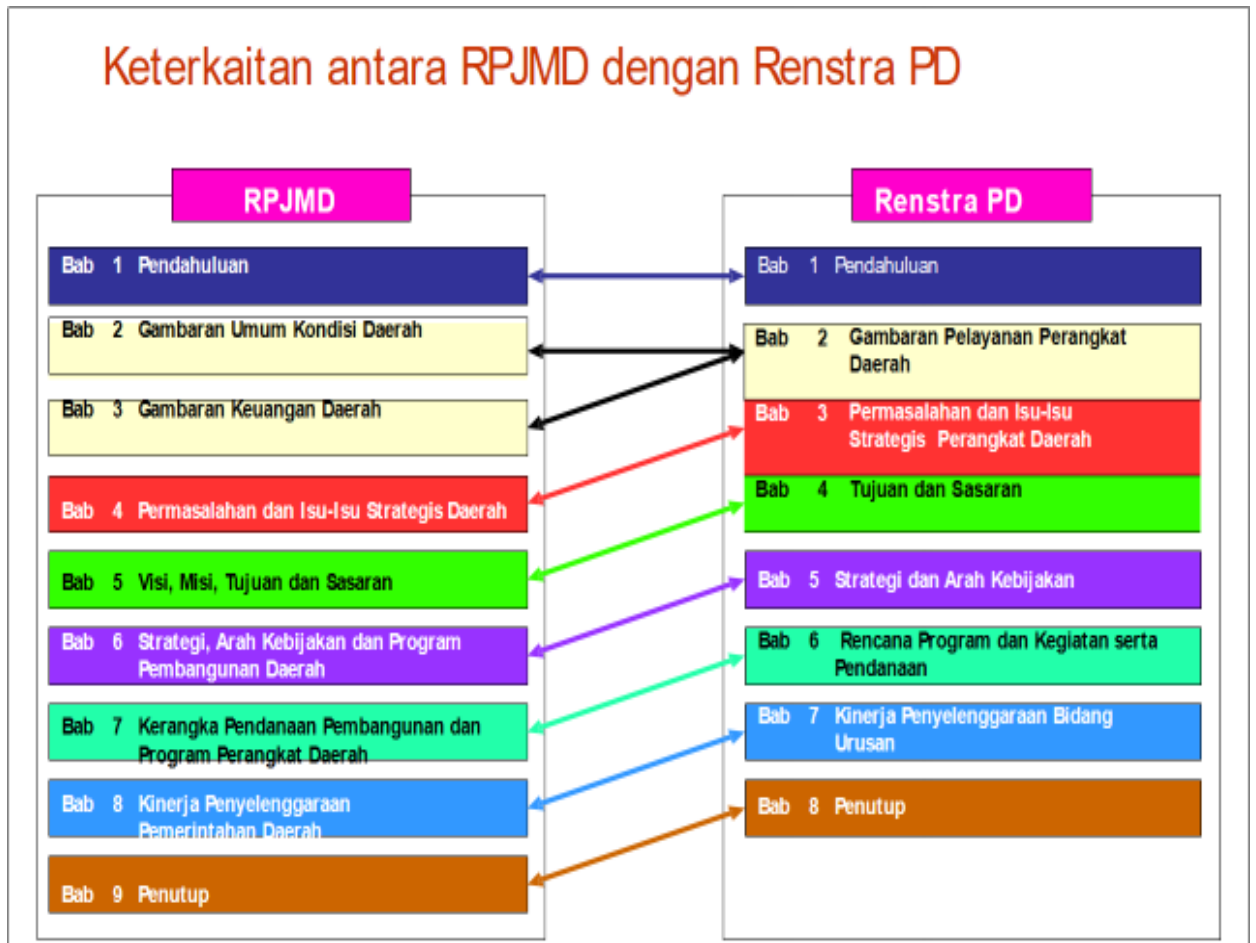
Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Perubahan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

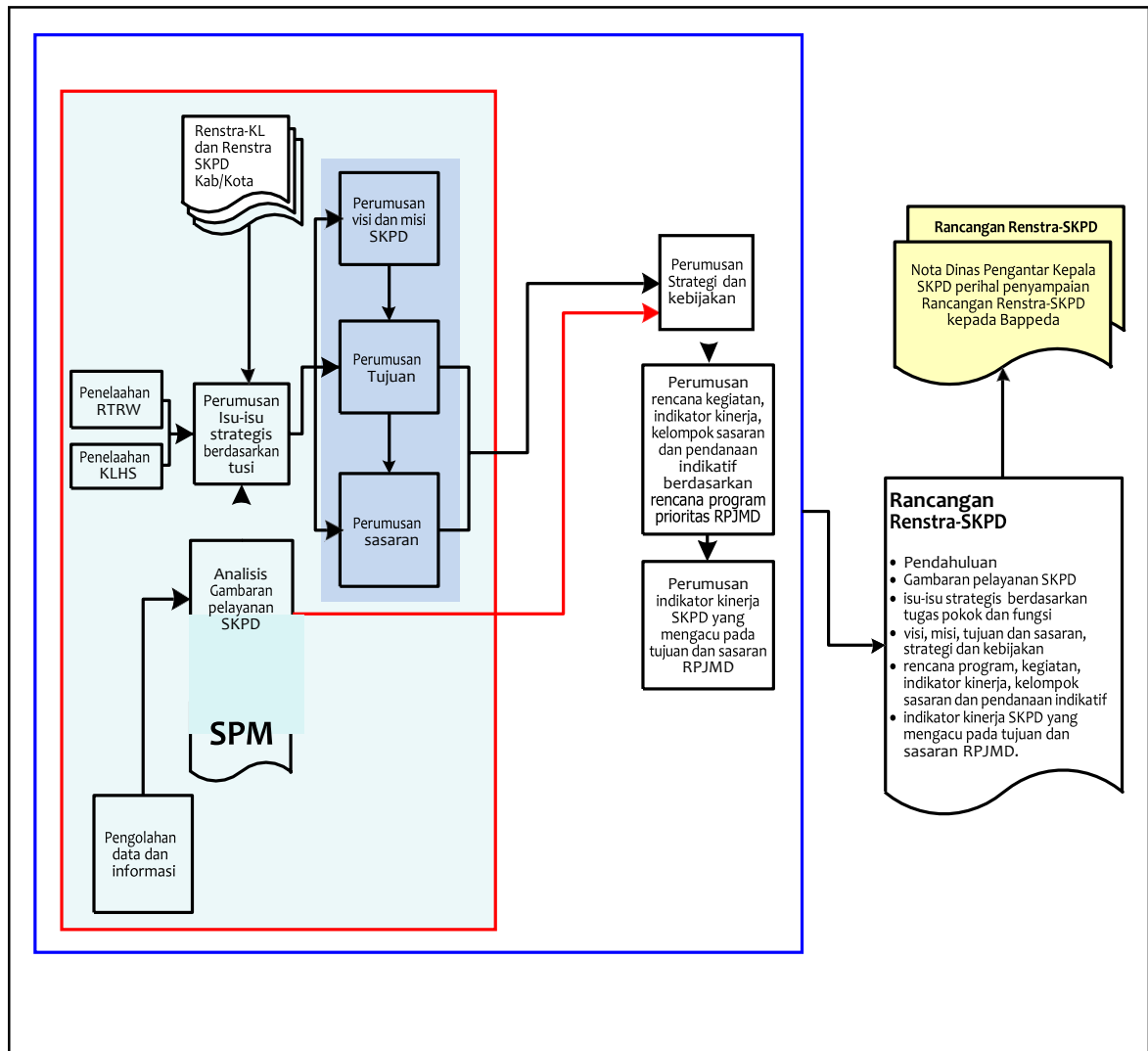
RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah /Provinsi dan keterkaitan antara RPJMD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra PD

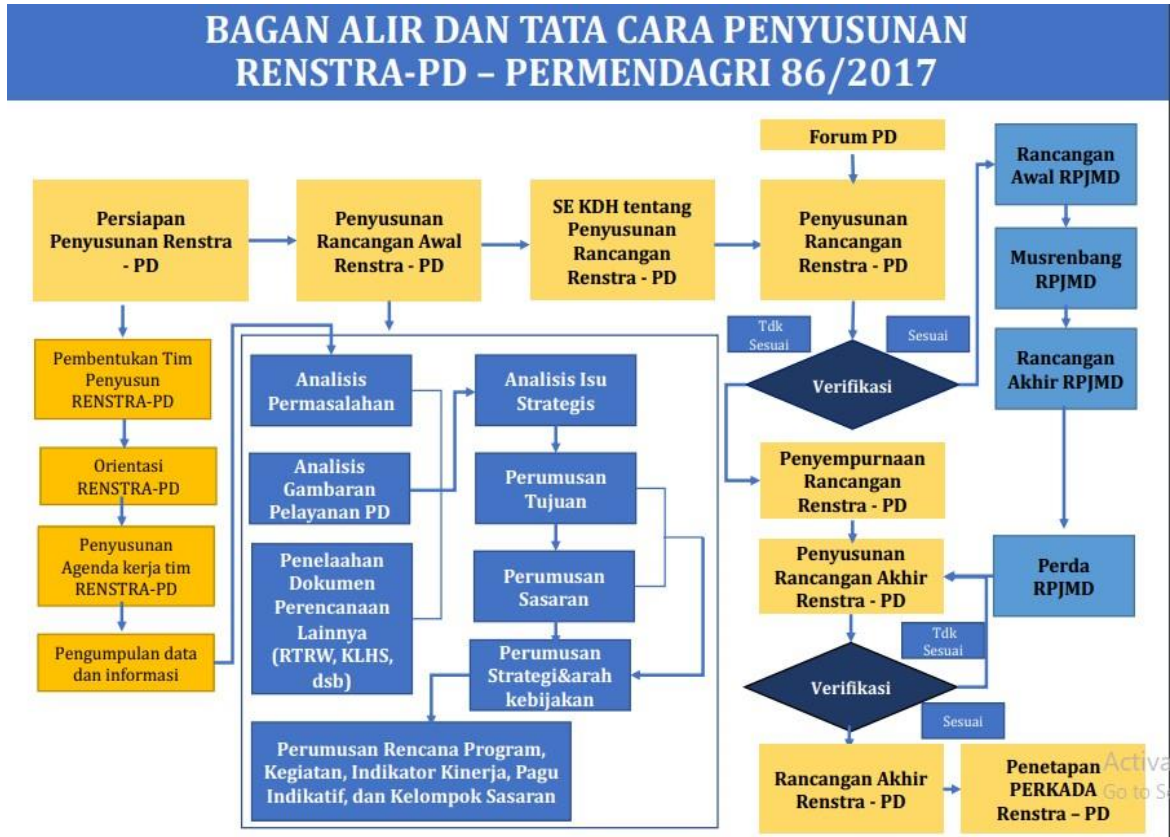


Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Review Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Instimewa Jogjakarta (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

- Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kondefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kondefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutanaan Gender;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2023;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto

- Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaga Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 3);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah No.9 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 6 Tahun 2023 Tentang APBD TA 2024;
 32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
 33. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021;
 34. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
 35. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026;

36. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
37. Peraturan Bupati Nomor 188.45/280/HK/416-012/2023 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2016;
38. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024;
39. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK);
40. Keputusan Kepala Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/3659/KEP/416-101/2023 Tentang Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2023;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan penetapan review Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 memiliki maksud :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Mojokerto, khususnya periode 2021 – 2026;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto;
3. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di bidang penanggulangan bencana;
4. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*)

pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di wilayah Kabupaten Mojokerto;

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan antara lain :

1. Menjabarkan sasaran strategis dan program DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan bencana dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Review Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat

daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah terdiri atas :

KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

SEKRETARIAT

- (1). Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk mengkoordinasikan bidang – bidang dan memberikan pelayanan administrasi serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan tata laksana dan hubungan masyarakat ;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang – undangan dan penataan organisasi ;
- e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset ;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang - bidang dan UPTD di lingkungan Dinas ;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;

Sekretariat membawahi :

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian ;
 - b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ;
 - d. Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian ;
 - e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset ;
 - f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian :
 - g. Melakukan evaluasi penyusunan laporan ; dan
 - h. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretariat.

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk serta data dan analisa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang PengendalianPenduduk, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga ;
- c. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangkapingendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian penduduk;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk;
- h. Pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian penduduk;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan Kepala Dinas.

BIDANG PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

(1) Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi pendayagunaan penyuluhan keluarga berenana/ petugas lapangan keluarga berencana dan institusi masyarakat pedesaan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta advokasi komunikasi, informasi, edukasi, pembinaan, dan peningkatan kesertaan keluarga berencana ;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana (KB);
- b. Pelaksanaan norma, standart, prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berecana (KB) ;
- c. Pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan

pemberdayaan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan ditingkat kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) ;

- d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) ;
- e. Pelaksanaan penerimaan penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian obat kotrasepsi di daerah ;
- f. Pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di daerah ;
- g. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana (KB) di daerah ;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana (KB) ;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang Keluarga Berencana (KB) ;
- j. Pelaksanaan koordinasi dibidang Keluarga Berencana (KB) ;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; dan
- l. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi ketahanan keluarga remaja dan konseling remaja, ketahanan keluarga balita dan lanjut usia serta kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. Pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, serta bina keluarga lanjut usia dan rentan serta pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;

- e. Pelaksanaan pemantuan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- g. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

**BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidan Pemberdayaan Perempuan dan serta pengarusutamaan gender;
 - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender ;
 - c. Pelaksaaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan, serta pengarusutamaan gender;
 - d. Perumusan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender ;
 - e. Perumusan pelambagaan pengarusutamaan gender ;
 - f. Perumusan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan ;
 - g. Pelakasaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender ;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. Pelakasaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

- (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pengelolaan sistem data dan gender anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak Mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang perlindungan anak serta pengelolaan sistem data gender dan anak ;
 - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan anak serta pengelolaan sistem data gender dan anak ;
 - c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perlindungan anak ;
 - d. Perumusan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha ;
 - e. Perumusan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan anak ;
 - f. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak ;
 - g. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov) ;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas ;

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

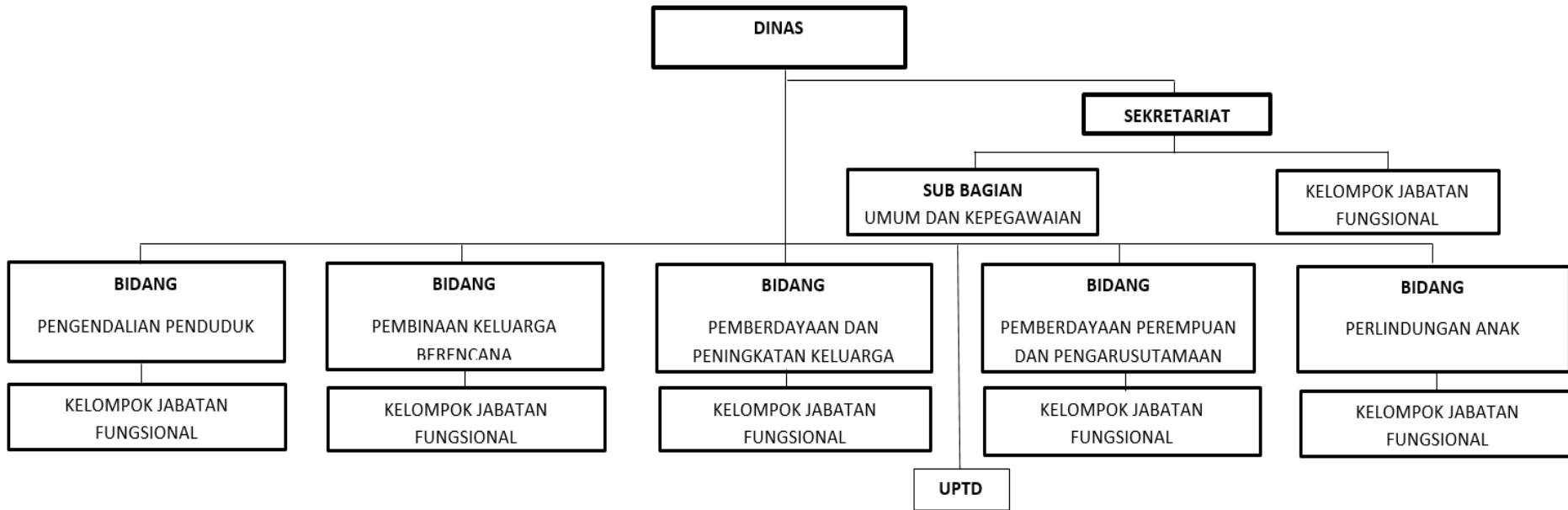
- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;

- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sub koordinator ;

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**



BUPATI MOJOKERTO,

ttd.

IKFINA FAHMAWATI

2.2. Sumber Daya Dinas P2KBP2

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana serta prasarana. Sumber daya manusia Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto (Kondisi Per Januari Tahun 2024)

34 ORANG TERDIRI DARI			KEKUATAN PEGAWAI			
ES. I :	ES. III : 6	JFT : 12	IV/e :-	III/d : 8	II/c : 1	I/b :-
ES. II : 1	ES. IV : 1	JFU : 15	IV/d :-	III/c : 2	II/b :	I/a :-
			IV/c :-	III/b : 2	II/a :	
			IV/b :-	III/a : 6	I/d :-	
			IV/a : 11	II/d : 4	I/c :-	

NO	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jumlah Pegawai PNS	15	19	34
2	Tingkat Pendidikan PNS			
	a. SD			
	b. SLTP	1		1
	c. SLTA	3	2	5
	d. Diploma - 2 (D-2)			
	e. Diploma - 3 (D-3)			
	f. Sarjana Strata 1 (S-1)	4	19	14
	g. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	7	7	14
	h. Doktor (S-3)			
3	Golongan Kepangkatan PNS	15	19	34
	a. I/a			
	I/b			
	I/c			
	I/d			

	b. II/a			
	II/b			
	II/c	1		1
	II/d	3	1	4
	c. III/a	1	5	6
	III/b	1	1	2
	III/c	1	1	2
	III/d	4	4	8
	d. IV/a	7	4	11
	IV/b			
	IV/c			
	IV/d			
4	PNS menurut Agama	15	19	34
	a. Islam	15	19	34
	b. Protestan			
5	PNS Menurut Golongan Umur	16	16	34
	a. < 30 Tahun		3	3
	b. 30 - 39 Tahun		2	2
	c. 40 - 49 Tahun	4	2	6
	d. 50 - 55 Tahun	6	8	14
	e. > 55 Tahun	5	4	9
6	Tipe Pegawai	15	19	34
	a. Pejabat Struktural	4	4	8
	b. Jabatan Fungsional Tertentu	4	8	12
	c. Fungsional Umum	7	7	14

Berdasarkan data tersebut diatas, Formasi Jabatan Pejabat baik eselon II, III, dan IV Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sudah terpenuhi.

Dukungan sarana dan prasarana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 2.2

Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pengendalian Penduduk
 Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
 (Kondisi per Januari 2024)

No	Kode Bid./Barang	Keadaan Awal			Mutasi				Keadaan Akhir		
		Januari Th 2023			Berkurang		Bertambah		Januari Th. 2024		
		Jmh	Satuan	Nilai (Rp.)	Jmh	Nilai (Rp.)	Jmh	Nilai (Rp.)	Jmh	Satuan	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobil Toyota Inova	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
2	Mobil Minibus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mobil Toyota Hiace	1	Buah	-	-	-	-	-	-	buah	-
4	Mobil Toyota Avanza	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
5	Mobil Suzuki APV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Mobil Daihatsu Luxio	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
7	Mobil Isuzu D-Max	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Mobil Nissan Navara	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
9	Mobil Pck Up Box	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
10	AC	13	Buah	-	-	-	-	-	13	Buah	-
11	Brankas	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
12	Filing Kabinet	8	Buah	-	-	-	-	-	8	Buah	-
13	Almari Kaca	21	Buah	-	-	-	-	-	21	Buah	-
14	Meja Tamu	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
15	Meja Kerja	8	Buah	-	-	-	-	-	8	Buah	-
16	Meja Rapat	15	Buah	-	-	-	-	-	15	Buah	-
17	Meja Telpon	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
18	Kursi Lipat	54	Buah	-	-	-	-	-	54	Buah	-
19	Almari Kayu	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
20	Kursi Putar	10	Buah	-	-	-	-	-	10	Buah	-
21	Kursi Busa	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
22	Kursi Kayu	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
23	Mesin Ketik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Almari Besi	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
25	Komputer (PC)	9	Buah	-	-	-	-	-	9	Buah	-
26	Kipas Angin	6	Buah	-	-	-	-	-	6	Buah	-
27	PA	15	Buah	-	-	-	-	-	15	Buah	-
28	Scanner	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
29	Kamera Digital	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
30	Meja Komputer	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
31	LCD Projector	23	Buah	-	-	-	-	-	23	Buah	-
32	Laptop	72	Buah	-	-	-	-	-	72	Buah	-
33	Printer	32	Buah	-	-	-	-	-	32	Buah	-
34	Faximile	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
35	Vacuum Cleaner	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
36	Lemari ES	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-

No	Kode Bid./Barang	Keadaan Awal			Mutasi				Keadaan Akhir		
		Januari Th 2023			Berkurang		Bertambah		Januari Th. 2024		
		Jmh	Satuan	Nilai (Rp.)	Jmh	Nilai (Rp.)	Jmh	Nilai (Rp.)	Jmh	Satuan	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	TV	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
38	Sepeda Motor Suzuki	153	Buah	-	-	-	-	-	153	Buah	-
39	Sepeda Motor Honda Vario	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
40	Sepeda Motor Yamaha Mio	40	Buah	-	-	-	-	-	40	Buah	-
41	Sepeda Motor Yamaha BSWT	10	Buah	-	-	-	-	-	10	Buah	-
42	Handycam	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
43	Smart Phone	57	Buah	-	-	-	-	-	57	Buah	-
44	Wifi	4	Buah	-	-	-	-	-	4	Buah	-
45	Jaringan Telephone	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-

2.3 . Kinerja Pelayanan Dinas P2KBP2

Capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 rata – rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dengan indikator :

1. Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)
3. Prevalensi KB Aktif
4. Prosentase Keluarga yang ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam pencapaian sasaran ini di dukung oleh program :

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
2. Program perlindungan perempuan
3. Program peningkatan kualitas keluarga
4. Program pengelolaan sistem data gender dan anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program perlindungan khusus anak
7. Program pengendalian penduduk
8. Program pembinaan Keluarga Berencana
9. Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Selengkapnya Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana terinci dalam tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C 2.3

Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK 2015	Target IKK 2015	Target Indikator Lainnya (MDG'S) 2015	Target Rentra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	-	75,70	78,30	78,60	79,20	-	75,72	78,33	79,87	79,87		100	100	102	100
2.	Prosentase Keluarga Sejahtera	-	-	-	98,49	98,56	98,78	98,90	99,00	100	ge	100	100	100	108	101	101	101	101
3.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	-	-	-	78,60	78,62	78,83	78,84	78,85	81,65	80,35	80,52	80,87	80,62	104	102	102	103	102
4.	Prevalensi peserta KB aktif	-	n/a	-	78,60	78,62	78,83	78,84	78,85	81,65	80,35	80,52	80,87	80,62	104	102	102	103	102

5.	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap	-	n/a	-	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	5 Desa	250	250	250	250	250
6.	Rasio Anak Perempuan Terhadap Anak Laki - Laki di Tingkat Pendidikan Dasar, Lanjutan dan Tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi	-	-	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki - laki usia 15 -24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki - Laki (indeks melek huruf gender)	-	-	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor pertanian	-	-	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Proporsi Kursi DPR yang Didukuki Perempuan	-	-	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat daerah periode 2016 – 2021 menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indicator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indicator lainnya seperti MDG's atau indicator yang diratifikasi oleh pemerintah di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2020 sebesar 79,20% dapat direalisasi sebesar 79,87 % atau 100 %
2. Prosentase Keluarga Sejahtera
Target Prosentase Keluarga Sejahtera tahun 2020 sebesar 99,00% dapat direalisasi sebesar 100 % atau 101 %
3. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif
Target Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2020 sebesar 78,85% dapat direalisasi sebesar 80,62 % atau 102 %
4. Prevalensi peserta KB aktif
Target Prevalensi peserta KB aktif tahun 2020 sebesar 78,85% dapat direalisasi sebesar 80,62 % atau 102 %
5. Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan
Target Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan tahun 2020 target untuk 1 petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) membawahi 2 desa sedangkan realisasi tahun 2020 sampai dengan sekarang, 1 petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) membawahi desa 5
6. Rasio Anak Perempuan Terhadap Anak Laki - Laki di Tingkat Pendidikan Dasar, Lanjutan dan Tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi
Untuk Rasio Anak Perempuan Terhadap Anak Laki - Laki di Tingkat Pendidikan Dasar, Lanjutan dan Tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi bukan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas P2KBP2
7. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki - laki usia 15 -24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki - Laki (indeks melek huruf gender)

Untuk Rasio melek huruf perempuan terhadap laki - laki usia 15 -24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki - Laki (indeks melek huruf gender) bukan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas P2KBP2

8. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor pertanian

Untuk Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor pertanian bukan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas P2KBP2

9. Proporsi Kursi DPR yang Didukuki Perempuan

Untuk proporsi Kursi DPR yang Didukuki Perempuan bukan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas P2KBP2

Pencapaian kinerja dimaksud di dukung dengan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dengan rata – rata capaian realisasi selama tahun 2016 – 2017 adalah sebesar 98 %. Alokasi dan Realisasi anggaran setiap tahun secara terinci serta rasio pencapaian realisasi untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai/ gaji dan Tunjangan). Adalah sebagaimana pada Tabel 2.4. anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Adapun pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana dalam **Tabel 2.4.**

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016 - 2021

Uraian	Anggaran Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
BELANJA	13.087.097.500	13.945.884.500	17.824.026.900	15.232.727.100	14.038.013.370	11.998.449.673	12.805.413.341	11.832.912.191	12.818.101.276	12.967.149.212	96,57%	91,82%	66,39%	84,15%	92,37%	0,99%	1,03%
BELANJA OPERASI	11.312.390.500	12.786.463.000	16.693.626.900	14.063.927.100	12.610.913.370	10.882.939.673	11.678.073.341	10.745.247.191	11.735.245.176	11.626.671.612	96,20%	91,33%	64,37%	83,44%	92,20%	1,01%	1,01%
Belanja Pegawai	7.433.153.000	8.227.368.000	6.831.221.400	4.198.565.000	3.997.408.000	7.135.621.407	7.234.217.566	2.511.606.805	3.685.319.491	3.293.863.227	96,00%	87,93%	36,77%	87,78%	82,40%	0,81%	1,07%
Belanja Barang	3.879.237.500	4.559.095.000	9.862.405.500	9.865.362.100	8.613.505.370	3.747.318.266	4.443.855.775	8.233.640.386	8.049.925.685	8.332.808.385	96,60%	97,47%	83,49%	81,60%	96,74%	1,24%	1,21%
Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA MODAL	1.774.707.000	1.159.421.500	1.130.400.000	1.168.800.000	1.427.100.000	1.115.510.000	1.127.340.000	1.087.665.000	1.082.856.100	1.340.477.600	98,89%	97,23%	96,22%	92,65%	93,93%	0,98%	1,04%
Belanja Peralatan dan Mesin	496.776.000	559.421.500	1.130.400.000	1.168.800.000	1.427.100.000	496.275.000	527.990.000	1.087.665.000	1.082.856.100	1.340.477.600	99,90%	94,38%	96,22%	92,65%	93,93%	1,29%	1,27%
Belanja Aset Lainnya	1.277.931.000	600.000.000	-	-	-	1.258.659.000	599.350.000	-	-	-	98,47%	91,82%	-	-	-	-	-

Dari table TC. 24 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2016 – 2021 untuk tahun 2016 realisasi belanja mencapai 96,57 % tahun 2017 sedikit mengalami penurunan sebesar 4,75 % dengan prosentase 91,82% sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 25, 43% dengan prosentase 66,39 % tahun 2019 rasio antara realisasi dan anggaran mengalami kenaikan 17,05 % dengan prosentase 84,15 % tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 8,22 % dengan prosentase 92,37 %.

Berdasarkan table TC. 24 dapat kita simpulkan adanya penurunan dan kenaikan rasio capaian anggaran dari tahun 2016 – 2021 karena adanya beberapa factor yang mempengaruhi yaitu :

1. Belanja operasional untuk belanja pegawai pagu anggaran besar realisasi sedikit, ini di karenakan adanya pegawai yang purna tugas tapi tidak ada penambahan pegawai
2. Belanja operasional untuk belanja barang pagu anggaran dan realisasi anggran sudah sesuai atau baik
3. Belanja modal untuk belanja peralatan dan mesin pagu anggaran dan realisasi anggaran sudah sesuai atau baik
4. Belanja modal untuk belanja asset lainnya hanya ada di tahun 2016 dan 2017 saja dan realisasi sudah cukup baik

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP2KBP2

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, megacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk mengukur apakah proses dan tujuan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berjalan dengan baik atau tidak maka diperlukan suatu indikator. Adapun indikator Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tersebut antara lain : (a) Prosentase penurunan kenakalan remaja (b) Prosentase penanganan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan (c) Presentase keluarga sejahtera (d) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) (e) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif.

Masyarakat yang berdaya akan mampu dan bergairah kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan. Tingkat pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variable atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan fakta yang tersaji dalam indikator kinerja mulai dari pusat sampai dengan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, sejumlah indikator tentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi. Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur yang standart dalam melihat keberhasilan program pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Semuanya tergantung pada kepentingan, manfaat, kesepakatan. Apabila mengukur keberhasilan program pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah merupakan kensayaan.

Mencermati hasil analisis gambaran pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto, maka dapat di rumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto kedepan sebagai berikut :

Faktor tantangan Organisasi:

1. Tingginya kasus pernikahan anak (SD, SMP, SMK/SMA)

2. Masih rendahnya perlindungan perempuan dan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan
3. P2TP2A di tingkat Kecamatan belum optimal
4. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) desa belum optimal
5. Melemahnya komitmen keluarga kecil bahagia sejahtera
6. Kesertaan ber KB didominasi wanita
7. Masih rendahnya pemakaian alat kontrasepsi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)
8. Masih rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi
9. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang disalah gunakan
10. Belum semua pelayanan KB masyarakat di dukung BPJS
11. Distribusi alokon sulit menjangkau seluruh wilayah
12. Jumlah petugas lapangan tidak sebanding dengan jumlah desa
13. Angka unmetneed masih tinggi
14. Masih adanya Toga/Toma yang kurang mendukung program KB
15. Pemerintah lambat dalam penambahan pengangkatan PKB baru
16. Masih kuatnya budaya kawin muda

Faktor Peluang Organisasi:

1. Adanya dukungan dari Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat
2. Adanya dukungan dari fasilitas pelayanan (faskes) KB baik pemerintah maupun swasta
3. Adanya dukungan dari Dinas maupun Badan terkait
4. Adanya dukungan dari lembaga profesi seperti IBI (Ikatan Bidan Indonesia), TNI, Polri, PKK dsb.
5. Adanya dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat
6. Adanya peran lintas sektor dalam pembinaan kampung KB
7. Tersedianya tenaga sarana dan prasarana pelayanan dan alokon yang cukup
8. Adanya sarana dan prasarana mobilitas petugas lapangan yang memadai

9. Dukungan Partisipasi Masyarakat (IPM)
10. Adanya rekrutmen PNS dari pemerintah untuk PKB/PLKB
11. Komitmen mitra kerja yang cukup baik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto, analisis terhadap isu – isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Ketepatan dalam pembentukan prioritas pembangunan akan mempermudah dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program secara keseluruhan.

Langkah awal dalam isu – isu strategis adalah dengan merumuskan, mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang ada diDinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Masih rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas

Upaya – upaya yang dilakukan untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan keluarga dalam rangka mendukung terwujudnya keluarga kecil berkualitas yang bercirikan kemandirian dan kesejahteraan masih rendah sehingga hak asasi dan martabat manusia khususnya yang terkait dengan kesehatan reproduksi masih jauh dari harapan

b. Kurangnya pelayanan komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Masih banyaknya perkawinan pertama wanita berusia dibawah 21 tahun hal ini dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang akan

melahirkan anak yang akan dilahirkan untuk itu perlu adanya peningkatan akses informasi, peningkatan akses pelayanan PIK Remaja, peningkatan kualitas dan pengelolaan jaringan serta keterpaduan program PIK Remaja sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif tentang kesehatan reproduksi remaja dan pemenuhan hak – hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender

c. Masih tingginya keluarga – keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minim

Melihat masih banyaknya keluarga miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang papan dan kesehatan maka perlu kiranya ada gerakan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang merupakan kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan ibu – ibu yang berasal dari keluarga miskin maupun peserta KB guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera

d. Masih rendahnya ketahanan dan kualitas lingkungan keluarga

Pada kenyataannya masih banyak keluarga yang rentan terhadap kemampuan fisik – material spiritual guna hidup mandiri hal tersebut disebabkan karena kualitas keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya masih rendah, untuk itu perlu dorongan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia berdasarkan siklus hidup yaitu mulai janin dalam kandungan sampai lanjut usia dalam rangka pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera

e. Masih tingginya Unmeet need

Berdasarkan pencapaian peserta KB Aktif semua metode Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember Tahun 2023 adalah 184.695 akseptor, Pencapaian tertinggi Kecamatan Kemlagi 14.691 akseptor atau 160,27% dari PPM, dan terendah Kecamatan Pacet 4.711 akseptor atau 149,32% dari PPM.

Sedangkan pencapaian peserta KB Aktif MKJP sebesar 58.076 akseptor dan PA-Pria sejumlah 361 Akseptor.

Adapun tingkat kesertaan ber KB masyarakat atau prevalensi sebesar 80,23 % dari PUS sejumlah 230.204 Prevalensi tertinggi adalah Kecamatan Dawarblandong yaitu 83,17 % dan yang terendah Kecamatan Pungging sebesar 77,75 %.

Adapun jenis alat kontrasepsi terbanyak digunakan di Kabupaten Mojokerto adalah suntik yaitu 91.777 akseptor dan terendah MOP yaitu 361 akseptor.

Pencapaian Peserta KB Aktif per Mix Kontrasepsi sebagai berikut :

No.	Jenis Kontrasepsi	Pencapaian Bulan Desember 2023
1	IUD	22.654
2	MOW	12.599
3	MOP	361
4	Kondom	5.526
5	Implant	22.462
6	Suntik	91.777
7	Pil	29.316
	TOTAL	184.695

Perbandingan Prevalensi KB Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 s/d 2023

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB Aktif	Prevalensi (%)
1.	2019	240.593	194.562	80,87
2.	2020	245.061	197.565	80,62
3.	2021	247.373	199.545	80,67

	2022	227.174	183.388	80,73
	2023	230.204	184.695	80,23

Dari data diatas, maka prevalensi per tahun stabil 80 %. Hal ini diharapkan dalam kurun waktu tersebut mampu menurunkan angka TFR dari Kabupaten Mojokerto. Dengan melihat indikasi kestabilan prevalensi tersebut maka KIE dan pembinaan kepada akseptor perlu ditingkatkan agar angka DO dapat ditekan dan melestarikan akseptor KB.

Berdasarkan Pencapaian peserta KB Aktif semua metode Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember adalah 184.695 akseptor, Pencapaian tertinggi Kecamatan Jetis 14.691 akseptor atau 142,62 % dari PPM, dan terendah Kecamatan Trawas 4.711 akseptor atau 149,32 % dari PPM. Sedangkan pencapaian peserta KB Aktif MKJP sebesar 58.076 akseptor dan PA-Pria sejumlah 361 Akseptor. Adapun tingkat kesertaan ber KB masyarakat atau prevalensi sebesar 80,23 % dari PUS sejumlah 230.204 Prevalensi tertinggi adalah Kecamatan Dawarblandong yaitu 83,17 % dan yang terendah Kecamatan Pungging sebesar 77,75 %. Adapun jenis alat kontrasepsi terbanyak digunakan di Kabupaten Mojokerto adalah suntik yaitu 91.777 akseptor dan terendah MOP yaitu 361 akseptor.

Dari data diatas, maka prevalensi per tahun stabil 80 %. Hal ini diharapkan dalam kurun waktu tersebut mampu menurunkan angka TFR dari Kabupaten Mojokerto. Dengan melihat indikasi kestabilan prevalensi tersebut maka KIE dan pembinaan kepada akseptor perlu ditingkatkan agar angka DO dapat ditekan dan melestarikan akseptor KB.

f. Cakupan PIK – REMAJA cukup tinggi

Cakupan PIK – Remaja baik PIK – R jalur pendidikan, maupun jalur masyarakat diperlukan pembinaan yang lebih efektif dan konsisten dengan harapan terbentuknya generasi berencana (Genre)

g. Masih rendahnya kesetaraan gender dalam masyarakat.

Selama ini pemahaman masyarakat tentang gender masih kurang adalah peran-peran yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka seperti pengasuhan anak dan mencari nafkah bagi keluarga. Secara sosial peran gender ini dilekatkan pada jenis kelamin tertentu seperti peran pencari nafkah selalu dilekatkan pada laki-laki karena sifatnya yang dianggap maskulin sedangkan Perempuan lebih identik dengan pekerjaan rumah tangga. Peran gender sendiri adalah sebuah konstruksi sosial, di mana masyarakat memiliki peran menciptakan perspektif dalam peran gender dan bukan secara biologis terberi.

h. Masih rendahnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan.

Masih banyaknya terjadi pelecehan seksual dan tindak kekerasan terhadap anak faktor penyebab pelanggaran seksual anak tidak diketahui secara meyakinkan. Pengalaman pelecehan seksual sebagai seorang anak yang sebelumnya dianggap sebagai faktor risiko yang amat kuat, tetapi penelitian tidak menunjukkan hubungan kausal, karena sebagian besar anak-anak dilecehkan secara seksual tidak tumbuh menjadi seorang pelaku pada saat telah dewasa, juga tidak ada mayoritas pelaku dewasa yang dilaporkan mengalami pelecehan seksual masa kanak-kanak.

i. Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan.

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya peranan wanita dalam pembangunan masih kurang karena masih menganggap peran laki – laki lebih penting atau lebih dominan dalam sektor pembangunan.

j. Kurangnya kualitas data yang tepat dan akurat.

terlalu banyak data yang terkumpul dapat menyebabkan sedikit waktu untuk mengerjakan dan akhirnya mengambil “jalan pintas” untuk menyelesaikan laporan.

Tabel T-B 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sumber Daya Manusia yang masih belum merata	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesetaraan gender dalam masyarakat - Kurangnya pemahaman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh perangkat daerah dan stakeholder terkait - Kurangnya pemahaman dan pemenuhan data terpilah untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh perangkat daerah 	Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi
2.	Masih rendahnya moralitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan, masih tingginya angka pernikahan anak - Masih kurangnya pemahaman stakeholder terkait yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak 	Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi

3.	Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Kurangnya kesempatan perempuan dalam pembangunan	Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi
4.	Masih kurangnya kualitas pendidikan perempuan dalam masyarakat	Kurangnya kualitas perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi	Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi
5.	Kurang optimalnya penanganan secara menyeluruh bagi kesehatan korban kekerasan seksual dan penganiayaan akibat KDRT dari pemerintah	Kurangnya penanganan kesehatan (rapat inap, pengobatan dan kontrol/perawatan setelah sakit)	Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi
6.	Masih adanya perkawinan di usia dini	Masih rendahnya usia perkawinan ideal	Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi
7.	Kesertaan ber KB (Khususnya MKJP) perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB MKJP - Masih tingginya Unmeetneed - Masih rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas 	Masih adanya pemahaman masyarakat banyak anak banyak rezeki, masih adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda tapi tidak ber KB
8.	Pemahaman mengenai pentingnya program Tribina (BKB, BKL, BKR) rendah	Kurangnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)	Kurangnya informasi, dukungan dana dari desa kurang, Kurangnya motivasi

9.	Masih adanya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesejahteraan keluarga - Masih tingginya keluarga – keluarga yang belum dapat memahami kebutuhan dasar secara minim - 	Kurangnya modal usaha, kurangnya ketrampilan, kurangnya anggaran untuk mengadakan pelatihan
10.	Pemahaman masyarakat tentang program KB masih rendah	Kurangnya kualitas media, advokasi dan KIE KB	Kurangnya informasi, rendahnya kepedulian masyarakat untuk memahami program KB
11.	Data belum tersedia secara akurat	Kurangnya kualitas data yang cepat dan akurat	Sumber data dari bawah belum semua ada, sering adanya keterlambatan laporan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 Tahun kedepan periode 2021-2026 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia “**

Dengan 4 Misi yang akan dilakukan yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, dan Produktif yang Dilandasi Nilai – nilai Keimanan dan Ketakwaan.
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya, dan pelestarian lingkungan.

Terkaitnya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam upaya memberdayakan perempuan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahterah adalah selaras dengan visi Bupati dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera dan bermartabat dengan misi yaitu :

Misi 1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, dan Produktif yang Dilandasi Nilai – nilai Keimanan dan Ketakwaan.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi BUPATI
Dan Wakil BUPATI

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, dan Produktif yang Dilandasi Nilai – nilai Keimanan dan Ketakwaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesejahteraan keluarga - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB - Kurangnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok tribina (BKB, BKR, BKL) - Masih rendahnya perlindungan anak dari program pelecehan seksual dan tindak kekerasan - Masih rendahnya kesetaraan gender dalam masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kuatnya budaya pernikahan dini di Kabupaten Mojokerto • Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang pentingnya program Tribina (BKB, BKR, BKL) • Kurangnya di dukungnya dana • Kurangnya ketrampilan dalam peningkatan usaha dan pemasarannya • Masih rendahnya kesetaraan Gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesadaran mencapai usia perkawinan ideal • Partisipasi aktif menjai anggota program Tribina (BKB, BKR, BKL) • Adanya kegiatan usaha di keluarga untuk meningkatkan pendapatan usaha • Adanya kesetaraan gender
2.	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)			
3.	Sasaran : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta Keluarga Berencana			

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. • Lokasi dan sarana prasarana sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A masih belum representative • Belum tersedianya rumah aman anak bagi anak yang berhadapan dengan hokum atau kasus kekerasan terhadap anak • Masih kurangnya stakeholder terkait yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak • P2TP2A tingkat kecamatan belum optimal • Gugus tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa belum optimal • Tingginya kasus perkawinan anak 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan Ekonomi • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Kurangkanya pemahaman Perencanaan, Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum di dukung /Terkendalanya biaya dalam usaha kelompok UPPKS • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>oleh Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman dan pemenuhan data terpilah untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh perangkat daerah 	<p>mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Pelayanan KB hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 21 tahun • Masih kurangnya sarana pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. • Masih tingginya Presentasi KB Baru yang unmet need • Belum optimalnya penggunaan MKJP KB Pria di Kabupaten Mojokerto • Masih rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas • Kurangnya pelayanan komunikasi, informasi, edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera • Masih tingginya keluarga – keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minim • Masih rendahnya ketahanan dan kualitas lingkungan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya PUS yang tidak ikut ber – KB • Kemampuan Daerah untuk menyediakan alat kontrasepsi terbatas • Pemahaman Keagamaan yang menghambat KB Pria 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan komitmen kembali pada stokholder dan mitra kerjayang terkait

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bagi Kabupaten Mojokerto

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 	<p>penganggaran responsif gender</p>	
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 		

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 dalam pasal 32 disebutkan bahwa : (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang, beserta pembiayaan yang didasarkan atas tata ruang dan (2) Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Berdasarkan ketentuan tersebut , maka pelaksanaan program pembangunan yang berwawasan lingkungan atau berkaitan dengan penggunaan ruang harus disesuaikan dan disinkronisasikan dengan tata ruangan yang telah ditetapkan.

Undang-undang No. 26 tahun 2007 menggariskan bahwa bagian Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktifitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah dan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah dimaksud, diperlukan program yang bersumber dari Pemerintah (Public Investment), masyarakat dan swasta (Private Investment). Program yang bersumber dari pemerintah, umumnya melalui mekanisme perencanaan antara lain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Bagian Kedua Pasal 7 disebutkan bahwa : Meningkatkan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat adalah upaya untuk mengurangi masalah (patologi relasi sosial) yang bernama “ketidaksetaraan gender” yang selama ini

terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, melalui kebijakan pembangunan yang mengarusutamakan gender selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka pernikahan anak.
2. Meningkatnya pelecehan seksual dan tindak kekerasan (KDRT) pada anak.
3. Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam politik, pengambilan keputusan, ekonomi dan pembangunan.
4. Meningkatnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan dan Ekonomi, untuk mencapai kesetaraan gender, maka harus ada komitmen yang tinggi dari seluruh OPD.
5. Banyaknya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.
6. Banyaknya Kasus Pernikahan Anak.
7. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak.
8. Meningkatkan usia perkawinan ideal.
9. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut KB.
10. Bertambahnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS).
11. Bertambahnya kesejahteraan keluarga.
12. Meningkatnya kualitas advokasi dan KIE KB lewat media.
13. Bertambahnya kualitas data yang cepat, tepat dan akurat.
14. Unmed Need masih Tinggi
15. KB MKJP Masih Rendah
16. Tingginya Stunting di Kabupaten Mojokerto

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Adapun Tujuan Perubahan Sasaran Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ialah untuk mendukung Misi Nomor 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto dengan tujuan MISI 1 yaitu Mewujudkan SDM yg sehat, cerdas, terampil dan produktif yg dilandasi nilai keimanan dan ketakwaan dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan 1 sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C. 25 sebagaimana berikut ini.

Table TC. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)						
1	Meningkatnya Kualitas Pembanunan Melalui Strategi Pengarustamaan Gender (PUG)		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,13%	91,14%	91,16%	91,18%	91,20%	91,22%
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	APE	APE Madya	APE Madya	APE Utama	APE Nindya	APE Nindya	APE Nindya
			KLA	KLA Madya	KLA Madya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Nindya
			Prevalensi KB Aktif	80,20%	80,21%	80,23%	80,30%	80,35%	80,35%
			Prosentase Keluarga yang ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	71,00%	71,11%	72,00%	72,50%	72,65%	72,75%

Tabel 4.2

Cascading Dinas Pengendalian Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kepala OPD	Sasaran :	1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana 2. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel				
	Indikator Sasaran :					
	1. Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)					
	2. Kabupaten Layak Anak (KLA)					
	3. Prevalensi KB Aktif					
	4. Prosentase Keluarga yang ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
	Program 2.08.02	Program 2.08.06	Program 2.14.02	Program 2.14.03	Program 2.14.04	Program 1.02.01
	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pengendalian Penduduk	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sasaran Program :	Sasaran Program :	Sasaran Program :	Sasaran Program :	Sasaran Program :	Sasaran Program :
	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Mojokerto	Kecamatan/desa yang melakukan Pemenuhan Hak Anak	Penyuluh KB/PLKB dan lintas sektor	PUS (Pasangan Usia Subur), Kader PPKBD dan Sub PPKBD, Media massa/elektronik	Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS)	Meningkatnya pelayanan penunjang administrasi perkantoran
	Indikator Program :	Indikator Program :	Indikator Program :	Indikator Program :	Indikator Program :	Indikator Program :
	Prosentase Kelambagaan Daerah yang Responsif Gender	- Prosentase kecamatan layak anak - Prosentase desa kelurahan layak anak	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	Nilai SAKIP PD
	Kegiatan 2.08.02. 2. 01 :	Kegiatan 2.08.06. 2. 01 :	Kegiatan 2.14.02. 2. 01 :	Kegiatan 2.14.03. 2. 01 :	Kegiatan 2.14.04. 2. 01 :	Kegiatan 1.02.01.2.01:
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	Kewenangan Kabupaten / Kota	Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :
OPD/Desa agar responsive gender	Meningkannya pengetahuan Forum anak dan kecamatan dan desa tentang PHA	Penyuluh KB/PLKB dan lintas sektor yang memahami program KKBPK	Meningkatnya pemahaman stakeholder dan mitra kerja tentang program KKBPK	Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R	Meningkatnya perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan tepat waktu
Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :
Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsive gender	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	Jumlah media komunikasi program KKBPK	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target
Kegiatan 2.08.02. 2. 02 :	Kegiatan 2.08.06. 2. 02 :	Kegiatan 2.14.02. 2. 02 :	Kegiatan 2.14.03. 2. 01 :	Kegiatan 2.14.04. 2. 02 :	Kegiatan 1.02.01.2.02 :
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan
PEKKA dan perempuan korban kekerasan dan perempuan yang yang di latih berwirausaha	Meningkannya pengetahuan forum anak, kecamatan dan desa tentang KHA (Konvensi Hak Anak) dari unsur pendidikan, kesehatan dan forum anak	Penyuluh KB/PLKB yang melakukan pendataan keluarga (PK)	Meningkatnya pemahaman Penyuluh KB/PLKB tentang program KKBPK	Meningkatnya pemahaman mitra kerja tentang program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya ketertiban administrasi keuangan
Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :

	Jumlah PEKKA dan Perempuan Korban Kekerasan yang Dilatih Berwirausaha	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto	Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2021 yang Dipetakan	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	Jumlah Mitra Kerja yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
	Kegiatan 2.08.02. 2. 03:			Kegiatan 2.14.03. 2. 03 :		Kegiatan 1.02.01.2.04 :
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sasaran Kegiatan :			Sasaran Kegiatan :		Sasaran Kegiatan :
	Korban yang mendapatkan penanganan (sesuai yang di perlukan korban) dari P2TP2A dan Meningkatnya pemahaman bagi kepala desa untuk berkomitmen dalam pemantauan pendampingan terhadap korban perempuan dan anak			Kader PPKBD/Sub PPKBD, PLKB Non PNS dan petugas faskes		Meningkatnya kinerja pegawai
	Indikator Kegiatan :			Indikator Kegiatan :		Indikator Kegiatan :
	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan			Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP		IP ASN Perangkat Daerah
				Kegiatan 2.14.03. 2. 04 :		Kegiatan 1.02.01.2.06 :
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat		Administrasi Umum Perangkat Daerah

				Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
				Sasaran Kegiatan :		Sasaran Kegiatan :
				PPKBD dan Sub PPKBD		Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
				Indikator Kegiatan :		Indikator Kegiatan :
				Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPK		Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan
						Kegiatan 1.02.01.2.07 :
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Sasaran Kegiatan :
						Meningkatnya penyediaan sumber daya air dan listrik
						Indikator Kegiatan :
						Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Kegiatan 1.02.01.2.08 :
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah

						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Sasaran Kegiatan :
						Meningkatnya pemeliharaan BMD
						Indikator Kegiatan :
						Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik
	Program 2.08.03	Program 2.08.07				
	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Khusus Anak				
	Sasaran Program :	Sasaran Program :				
	Perempuan korban kekerasan	ABH dan anak korban kekerasan				
	Indikator Program :	Indikator Program :				
	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan				
	Kegiatan 2.08.03. 2. 01 :	Kegiatan 2.08.07. 2. 01 :				
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota				
	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :				
	Perempuan korban kekerasan	ABH dan Anak korban kekerasan				
	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :				

	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO				
	Kegiatan 2.08.03. 2. 02 :	Kegiatan 2.08.07. 2. 02 :				
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				
	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :				
	Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan operasional korban (jasa medikolegal, bantuan hukum, jasa sikiater, juru bahasa untuk korban tuna wicara)	Petugas layanan korban kekerasan perempuan dan anak ABH dan Anak korban kekerasan yang dilatih aplikasi simfoni PPA				
	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :				
	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan				
	Kegiatan 2.08.03. 2. 03 :	Kegiatan 2.08.07. 2. 03 :				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				
	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :				

	Meningkatnya pengetahuan pengurus layanan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pengetahuan pelayanan pendampingan	Meningkatnya pengetahuan desa tentang desa layak anak				
	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :				
	Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan	Jumlah kepala desa yang memahami desa layak anak				
	Program 2.08.04					
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga					
	Sasaran Program :					
	Kepala desa/perangkat desa yang memahami pelaksanaan PUG di desa					
	Indikator Program :					
	Prosentase kepala desa yang mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG di desa					
	Kegiatan 2.08.04. 2. 01 :					
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					
	Sasaran Kegiatan :					
	Meningkatnya pengetahuan kepala desa tentang PPRG					
	Indikator Kegiatan :					

	Jumlah Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa					
	Program 2.08.05					
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					
	Sasaran Program :					
	Seluruh stakeholder yang memiliki data terpilah gender dan anak					
	Indikator Program :					
	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak					
	Kegiatan 2.08.05. 2. 01 :					
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					
	Sasaran Kegiatan :					
	OPD terkait dan stakeholder					
	Indikator Kegiatan :					
	Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun					

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang diterapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto yaitu Tabel TC 26.

Tabel TC 26
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

VISI : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia			
MISI 1 : Mewujudkan SDM yg sehat, cerdas, terampil dan produktif yg dilandasi nilai keimanan dan ketakwaan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	- Menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi dan validasi di bidang PUG dan PUHA	- Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak
		- Meningkatkan pembinaan pelaksanaan peningkatan penguatan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan	- Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan

		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan validasi dengan mitra kerja di bidang ketahanan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga
		<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembinaan upaya meningkatkan usia perkawinan ideal - Melakukan pembinaan guna memberikan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ikut KB - Melakukan pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan - Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisien dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin ada ditunda dan tidak ingin anak lagi) - Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENGADAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Rencana Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Perubahan Tahun 2016 – 2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP2. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel 6.1 berikut ini yang bersumber dari Tabel T-C. 27 :

TC - 27

Program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Perubahan Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja RENSTRA Lama														Usulan Perubahan Target RENSTRA								Formula Indikator	Unit Kerja PD Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun ke 0		Tahun ke 1		Tahun ke 2		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Tahun ke 3		Tahun ke 4		Tahun ke 5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD						
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
						2021	2022	2023		2024		2025		2026		2024		2025		2026		2024		2025		2026					2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
Tahun 2021-2026																																
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,10 %			91,14 %				91,16 %								91,18 %												DP2KBP2
	Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif Efisien dan Akuntabel			Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			51 (CC)					52 (CC)																			DP2KBP2	
		2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,28 (A)		83,78 (A)	6.279.423.390	84,28 (A)	6.354.423.390	84,78 (A)	6.299.423.390	85,20 (A)	6.299.423.390	85,78 (A)	6.314.423.390	85,78 (A)	6.314.423.390	84,78 (A)	5.768.887.775	85,28 (A)	6.301.844.675	85,78 (A)	6.316.844.675	85,78 (A)	6.316.844.675	85,78 (A)	6.316.844.675			DP2KBP2	
		2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	5 Dokumen		90%	15.000.000	90%	15.000.000	90%	15.000.000	90%	15.000.000	90%	15.000.000	90%	15.000.000	90%	12.700.000	90%	12.700.000	90%	12.700.000	90%	12.700.000	90%	12.700.000			DP2KBP2	
		2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen		5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	7.500.000	2 Dokumen	7.500.000			DP2KBP2	

		2.14.01.2.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	5.000.000		1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.200.000	1 Laporan	5.200.000	1 Laporan	5.200.000	1 Laporan	5.200.000		DP2KBP2					
		2.14.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Raelisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,37%			85,00%	5.516.800.990		86,00%	5.516.800.990	87,00%	5.516.800.990	88,00%	5.516.800.990	89,00%	5.516.800.990	89,00%	5.316.344.000	89,00%	5.516.800.990	89,00%	5.516.800.990	89,00%	5.516.800.990		DP2KBP2			
		2.14.01.2.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 orang			32 orang	5.516.800.990		32 orang	5.516.800.990	32 orang	5.516.800.990	32 orang	5.516.800.990	32 orang	5.516.800.990	40 Orang	5.316.344.000	40 Orang	5.516.800.990	40 Orang	5.516.800.990	40 Orang	5.516.800.990		DP2KBP2			
		2.14.01.2.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DP2KBP2			
		2.14.01.2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	-			7 Laporan	65.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DP2KBP2			
		2.14.01.2.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan lainnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-			1 Paket	65.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DP2KBP2			
		2.14.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	90%			90%	258.000.000		90%	258.000.000	90%	258.000.000	90%	258.000.000	90%	258.000.000	90%	162.721.375	90%	262.721.375	90%	262.721.375	90%	262.721.375		DP2KBP2			
		2.14.01.2.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket			18 Paket	50.000.000		18 Paket	50.000.000	18 Paket	50.000.000	18 Paket	50.000.000	18 Paket	50.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000		DP2KBP2	
		2.14.01.2.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	356 Paket			240 Paket	12.000.000		240 Paket	12.000.000	240 Paket	12.000.000	240 Paket	12.000.000	240 Paket	12.000.000	240 Paket	12.000.000	240 Paket	12.000.000	240 Paket	12.000.000	240 Paket	12.000.000	240 Paket	12.000.000		DP2KBP2	
		2.14.01.2.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	41.000.000		4 Paket	41.000.000	4 Paket	41.000.000	4 Paket	41.000.000	4 Paket	41.000.000	4 Paket	41.000.000	4 Paket	41.000.000	4 Paket	41.000.000	4 Paket	41.000.000	4 Paket	41.000.000		DP2KBP2	
		2.14.01.2.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen			6 Dokumen	9.000.000		6 Dokumen	9.000.000	6 Dokumen	9.000.000	6 Dokumen	9.000.000	6 Dokumen	9.000.000	6 Dokumen	9.000.000	6 Dokumen	9.000.000	6 Dokumen	9.000.000	6 Dokumen	9.000.000	6 Dokumen	9.000.000		DP2KBP2	
		2.14.01.2.06.07			Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket			4 paket	29.000.000		4 paket	29.000.000	4 paket	29.000.000	4 paket	29.000.000	4 paket	29.000.000	4 paket	33.721.375	4 Paket	33.721.375	4 Paket	33.721.375	4 Paket	33.721.375	4 Paket	33.721.375		DP2KBP2	
		2.14.01.2.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			12 Laporan	7.000.000		12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.000.000	12 Laporan	7.000.000		DP2KBP2	

		2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100%		100%	420.000.000	100%	470.000.000	100%	480.000.000	100%	490.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	1.427.000.000	100%	1.427.000.000	100%	1.427.000.000	100%	1.427.000.000	DP2KBP2	
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	100 orang		100 orang	150.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	210.000.000	100 orang	220.000.000	100 orang	230.000.000	100 orang	230.000.000	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	-	100 orang	DP2KBP2
		2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	-		-	-	5 Satuan Pendidikan	50.000.000	6 Satuan Pendidikan	60.000.000	7 Satuan Pendidikan	70.000.000	8 Satuan Pendidikan	80.000.000	8 Satuan Pendidikan	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBP2	
		2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan		1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	DP2KBP2	
		2.14.02.2.01.23	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-	DP2KBP2	
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2021 yang Dipetakan	1.169.760 jiwa		1.169.760 jiwa	270.000.000	1.169.760 jiwa	270.000.000	1.169.760 jiwa	270.000.000	1.169.760 jiwa	270.000.000	1.169.760 jiwa	270.000.000	1.169.760 jiwa	270.000.000	1.169.760 jiwa	1.427.000.000	1.169.760 jiwa	1.427.000.000	1.169.760 jiwa	1.427.000.000	1.169.760 jiwa	1.427.000.000	DP2KBP2	
		2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBP2	
		2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	DP2KBP2	

		2.14.03.2.03.06		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK FISIK)	3 Unit		3 jenis	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 jenis	50.000.000	3 jenis	50.000.000	3 jenis	50.000.000	6 Unit	1.436.129.000	6 Unit	1.436.129.000	6 Unit	1.436.129.000	6 Unit	1.436.129.000	DP2KBP2			
		2.14.03.2.03.07		Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	480 Orang		480 Orang	999.280.000	3 jenis	999.280.000	480 Orang	999.280.000	480 Orang	999.280.000	480 Orang	999.280.000	480 Orang	-	480 Orang	-	480 Orang	-	480 Orang	-	480 Orang			
		2.14.03.2.03.08		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	2 Laporan	23.700.000	2 Laporan	23.700.000	2 Laporan	23.700.000	2 Laporan	23.700.000	DP2KBP2			
		2.14.03.2.03.09		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	1 Laporan		1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	DP2KBP2		
		2.14.03.2.03.10		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	175 orang		175 orang	100.000.000	175 orang	100.000.000	175 orang	100.000.000	175 orang	100.000.000	175 orang	100.000.000	175 orang	-	175 orang	-	175 orang	-	175 orang	-	175 orang	DP2KBP2		
		2.14.03.2.03.13		Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Kesetaraan KB Pria	150 tenaga pelayanan		150 tenaga pelayanan	50.000.000	150 tenaga pelayanan	50.000.000	150 tenaga pelayanan	50.000.000	150 tenaga pelayanan	50.000.000	150 tenaga pelayanan	50.000.000	150 tenaga pelayanan	-	150 tenaga pelayanan	-	150 tenaga pelayanan	-	150 tenaga pelayanan	-	150 tenaga pelayanan	DP2KBP2		
					Jumlah Akseptor yang Mendapat Kesetaraan KB Pria	150 akseptor		150 akseptor	50.000.000	150 akseptor	50.000.000	150 akseptor	50.000.000	150 akseptor	50.000.000	150 akseptor	50.000.000	150 akseptor	-	150 akseptor	-	150 akseptor	-	150 akseptor	-	150 akseptor	DP2KBP2		
		2.14.03.2.03.09016		Promosi dan Konseling Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	1 Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 Orang	-	175 Orang	-	175 Orang	-	175 Orang	-	175 Orang	DP2KBP2		
		2.14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mensosialisasikan program Bangga Kencana (Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD		1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.112.672.000	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.112.672.000	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.112.672.000	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.112.672.000	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.112.672.000	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	598.000.000	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	598.000.000	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	598.000.000	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	598.000.000	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	598.000.000	DP2KBP2	

		2.14.04.2.01.0016			Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	5 Laporan											5 Laporan	48.000.000	5 Laporan	48.000.000	5 Laporan	48.000.000	5 Laporan	48.000.000			DP2KBP2
		2.14.04.2.01.0018			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	2 Jenis											20 Unit	360.000.000	20 Unit	360.000.000	20 Unit	360.000.000	20 Unit	360.000.000			DP2KBP2
		2.14.04.2.01.0019			Orientasi / Pelatihan Teknis Pelaksana / Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	100 orang											100 orang		100 orang		100 orang		100 orang			DP2KBP2	
		2.14.04.2.01.0021			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	1 Laporan											1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan			DP2KBP2	
		2.14.04.2.01.0023			Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Mendukung Tercapainya iBangga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan											18 Dokumen		18 Dokumen		18 Dokumen		18 Dokumen			DP2KBP2	

		2.14.04.2.01.0024		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelolaan dan Pelaksanaan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1 Laporan												2586 Orang	5.430.600.000	2586 Orang	5.430.600.000	2586 Orang	5.430.600.000	2586 Orang	5.430.600.000		DP2KBP2	
		2.14.04.2.01.0026		Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1 Laporan												72 Kelompok		72 Kelompok		72 Kelompok		72 Kelompok		DP2KBP2		
		2.14.04.2.01.0028		Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	1 Laporan												46 Kelompok	75.000.000	46 Kelompok	75.000.000	46 Kelompok	75.000.000	46 Kelompok	75.000.000		DP2KBP2	
		2.14.04.2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Mitra Kerja yang mendapatkan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	50 Org	50 Org	200.000.000	50 Org	200.000.000	50 Org	200.000.000	50 Org	200.000.000	50 Org	200.000.000	50 Org	200.000.000	50 Org	5.430.600.000	50 Org	5.430.600.000	50 Org	5.430.600.000	50 Org	5.430.600.000		DP2KBP2

BAB VII
INDIKATOR KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD setelah ada perubahan.

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel TC. 28

Tabel TC. 28 Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)						
1	Meningkatnya Kualitas Pembanunan Melalui Strategi Pengarustamaan Gender (PUG)		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,13%	91,14%	91,16%	91,18%	91,20%	91,22%
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana	APE	APE Madya	APE Madya	APE Utama	APE Nindya	APE Nindya	APE Nindya
			KLA	KLA Madya	KLA Madya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Nindya
			Prevalensi KB Aktif	80,20%	80,21%	80,23%	80,30%	80,35%	80,35%
			Prosentase Keluarga yang ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan	71,00%	71,11%	72,00%	72,50%	72,65%	72,75%

BAB VIII

P E N U T U P

Review Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, Sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 5 tahun.

Review Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2021 – 2026 merupakan penerjemah dari Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, khususnya yang berkenaan dengan Misi SATU yaitu **“Mewujudkan SDM yg sehat, cerdas, terampil dan produktif yg dilandasi nilai keimanan dan ketakwaan”**. Hal ini terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto di susun dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 yang telah direview dan tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD.

Dikemudian hari apabila ada perubahan – perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah di susun memerlukan penyesuaian.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Untuk itu kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan sehingga dimasa depan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Review Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat memberikan manfaat bagi publik atau masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan mandat kepada DP2KBP2 untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Renstra ini, dan kami tetap mengharap masukan serta kerjasamanya dimasa yang akan datang.

Mojokerto, 30 Desember 2023

KEPALA DINAS P2KBP2
KABUPATEN MOJOKERTO



SUGENG NURYADI, S.IP., MM

Pembina

NIP. 19681010 198903 1 008